

INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERBATASAN LAUT (PERSPEKTIF ILMU SOSIAL)

Alwi Usra Usman, Andi Agustang, Idham Irwansyah Idrus

¹Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pasca Sarjana, Universitas Negeri Makassar

Email: alwiusra@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian does have a very unique and strategic geographical condition as an archipelagic country with a very large number of islands. The purpose of this study is to find out: (1) problems and problems solving regarding the emergence of maritime terrorism issues from a social science perspective. (2) problems and solutions to Indonesia's problems in realizing the vision of the world's maritime axis from a social science perspective. This study uses defense theory from Brigadier General (Purn) Makmur Supriyanto in his writing "About Defense Science" and sea power theory from Alfred Thayer Mahan using secondary data, data collection techniques through library research and qualitative data analysis to reach conclusions. Based on the research results show that maritime terrorism is usually carried out with political or ideological goals. In this context, efforts to minimize the appearance of maritime terrorism news can be carried out by using a defense approach which consists of three main components, namely security defense, national defense and economic defense. In realizing the vision of the world's maritime axis, Indonesia can develop its maritime capabilities through increased sea power, both in the military and economic fields. From the two problems described above, we can solve both using the concept of maritime security.

Keywords: *Indonesia, Issues of Maritime Terrorism, Vision of the World Maritime Axis.*

ABSTRAK

Indonesia memang memiliki kondisi geografis yang sangat unik dan strategis sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) permasalahan dan pemecahan masalah mengenai kemunculan isu terorisme maritime dalam perspektif ilmu sosial. (2) permasalahan dan pemecahan masalah Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia dalam perspektif ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan teori pertahanan dari Brigjen (Purn) Makmur Supriyanto dalam tulisannya "Tentang Ilmu Pertahanan"

dan teori *sea power* dari Alfred Thayer Mahan dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis data kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme maritim biasanya dilakukan dengan tujuan politik atau ideologis. Dalam konteks ini, upaya untuk meminimalisir kemunculan berita terorisme maritim dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pertahanan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertahanan keamanan, pertahanan ketahanan nasional dan pertahanan ekonomi. Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia dapat mengembangkan kemampuan maritimnya melalui peningkatan kekuatan laut, baik di bidang militer maupun ekonomi. Dari kedua masalah yang diuraikan di atas, maka keduanya bisa kita selesaikan menggunakan konsep keamanan maritim.

Kata Kunci: Indonesia, Isu Terorisme Maritim, Visi Poros Maritim Dunia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang berada di daerah yang sangat strategis, yaitu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Tidak hanya itu, Indonesia juga diantarai oleh dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia yang menandakan bahwa posisinya tepat berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Posisi Indonesia yang penting juga membawa risiko dan tantangan dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairannya. Indonesia menjadi sasaran potensial bagi berbagai ancaman keamanan laut seperti pencurian, perampokan di laut, penyeludupan narkoba, terorisme laut dan berbagai kejahatan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi ancaman keamanan laut serta mengembangkan pertahanan dan keamanan laut yang handal dan modern. Selain itu, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia (Al Syahrin, 2018).

Indonesia memang memiliki kondisi geografis yang sangat unik dan strategis sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber daya ekonomi yang potensial. Namun, disisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan dan risiko dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan di Indonesia.

Laut di Kawasan Asia Tenggara juga memiliki nilai strategis sebagai wilayah pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan tersebut dan dunia pada umumnya menganggap penting untuk menjaga keamanan laut di wilayah tersebut agar tidak terjadi gangguan atau ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan perdagangan. Namun, dengan adanya laut di Kawasan Asia Tenggara juga menimbulkan konsekuensi negatif seperti meningkatnya tindak kriminal transnasional seperti pencurian, perampokan dan perdagangan narkoba. Selain itu, beberapa teroris juga memanfaatkan laut di wilayah tersebut sebagai target yang empuk untuk melakukan aksi teror. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya perlu meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan laut dan menangani tindak kriminal transnasional di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sangat penting untuk menjaga stabilitas laut dan melindungi sumber daya alam yang terdapat di laut.

Beberapa masalah keamanan laut yang kerap kali terjadi di Asia Tenggara adalah perampokan di laut, aksi terorisme, penyeludupan narkoba dan perdagangan manusia. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian di

kawasan. Negara-negara di Asia Tenggara perlu meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan laut dan menangani kejahatan transnasional di wilayah tersebut. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat keamanan, melakukan patrol laut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan laut (Lubis, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah pustaka dan analisis dari bahan yang ada dalam beberapa jurnal. Metode deskriptif difungsikan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Indonesia dalam menghadapi perbatasan laut (perspektif ilmu sosial). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data, teori serta konsep dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penggunaan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Indonesia dalam menghadapi perbatasan laut (Prasetyo et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperlukan kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam mengelola dan mengawasi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Negara-negara di kawasan tersebut perlu bekerja sama dalam hal pengawasan, pelacakan dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama regional, seperti ASEAN, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Pengelolaan daerah perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, TNI/POLRI, masyarakat dan sektor swasta. Adapun sesuatu yang harus diperhitungkan dalam mengelola daerah di perbatasan yaitu:

1. Pemetaan wilayah perbatasan yang jelas dan akurat sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas di wilayah tersebut.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana di daerah perbatasan seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara sehingga memudahkan mobilitas orang dan barang serta meningkatkan perekonomian daerah.

3. Peningkatan kapasitas TNI/POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan sehingga dapat mengatasi berbagai macam bentuk ancaman yang muncul.
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah perbatasan seperti pendidikan, kesehatan dan akses air bersih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi potensi terjadinya aksi kriminal.
5. Peningkatan kerja sama antar negara yang berbatasan dengan membenuk mekanisme koordinasi dan konsultasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di wilayah perbatasan.

Dalam pengelolaan daerah perbatasan, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan hak asasi manusia serta menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan daerah perbatasan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga stabilitas keamanan, sosial dan ekonomi negara (Marwasta, 2016).

A. Permasalahan Indonesia di Perbatasan Laut

1. Kemunculan Isu Terorisme Maritim

Bom Bali yang terjadi di Indonesia pada September 2011 telah memberikan info teoririsme serta turut aktif pada kebijakan *war on terror* yang dicanangkan oleh Amerika Serikat. Beberapa kritik mengenai program ini adalah bahwa program ini telah melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Misalnya, terdapat laporan mengenai penggunaan teknik interogasi yang disebut sebagai “*waterboarding*” dan “*rendition*” yang melibatkan penangkapan dan pengiriman tersangka teroris ke negara-negara yang dikenal melakukan tindakan penyiksaan. Selain itu, beberapa pihak juga mengkritik bahwa program ini hanya memfokuskan pada penggunaan tindakan militer untuk mengatasi masalah terorisme tanpa memberikan perhatian yang cukup pada faktor sosial dan politik yang mendorong terorisme. Hal ini dikritik karena tindakan militer dapat meningkatkan ketegangan dan kebencian yang dapat memicu lebih banyak tindakan terorisme di masa depan.

Namun, pihak yang mendukung program ini berpendapat bahwa tindakan militer adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menghadapi ancaman terorisme yang sangat serius. Mereka juga berpendapat bahwa program ini telah berhasil dalam mencegah serangan teroris yang lebih besar dan melindungi warga negara Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai program “perang melawan terorisme”. Penting untuk terus memperhatikan masalah terorisme dan mencari cara-cara yang efektif

untuk mengatasinya tanpa melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil (Lubis, 2018).

Selain Abu Sayyaf Group, terdapat juga kelompok teroris lainnya yang aktif di perairan Indonesia dan sekitarnya seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok ini seringkali menggunakan perairan sebagai jalur untuk melakukan penyeludupan senjata, narkoba, manusia dan sebagai tempat untuk bergerak dan bersembunyi. Aktivitas terorisme maritime seperti penculikan dan peyanderaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris ini telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi industri maritim dan keamanan di kawasan tersebut. Selain itu, hal ini juga berpotensi mengganggu perdagangan dan mengancam keselamatan jiwa manusia.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dalam hal peningkatan keamanan dan pemberantasan terorisme maritim. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan patrol dan pengawasan di perairan, penguatan intelijen, penangkalan informasi dan peningkatan kapasitas dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Tidak hanya itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan terorisme maritim. Masyarakat dapat memberikan informasi yang relevan dan membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan terorisme maritim. Dengan adanya kerja sama yang baik antarnegara dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan terorisme maritim dapat dicegah dan diatasi dengan efektif (Samy & Kusumadewi, 2021).

Membedakan antara aksi terorisme maritim dan aksi bajak laut memang dapat menjadi sulit karena terdapat beberapa persamaan dalam taktik dan teknik yang mereka gunakan. Namun, motif dari kedua tindakan tersebut berbeda. Bajak laut biasanya dilakukan dengan tujuan ekonomi, seperti merampok atau mencuri barang berharga dari kapal-kapal yang lewat. Sementara terorisme maritim biasanya dilakukan dengan tujuan politik atau ideologis. Selain itu, terorisme maritim juga dapat dilakukan oleh kelompok subnasional atau negara, sedangkan aksi bajak laut biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional atau individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Oleh karena itu, pemerintah dan komunitas internasional harus berhati-hati dan memperkuat kerja sama untuk mengatasi ancaman terorisme maritim dan bajak laut yang makin kompleks dan seringkali sulit dideteksi.

2. Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Penciri pokok dari visi poros maritim dunia ialah meningkatkan ciri-ciri maritim serta memperjelas pada “*archipelagic outlook*”, yaitu berkeahlian bahwa kawasan yang ada di Indonesia ialah sumber ekonomi dan kekuatan nasional. Dengan diplomasi maritim, Indonesia akan menjalin hubungan yang intens dengan berbagai negara dan pihak-pihak terkait lainnya di wilayah maritim sehingga dapat memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Selain itu, diplomasi maritim juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional yang berkaitan dengan isu maritim, seperti hukum laut internasional, pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan laut. Dengan mempromosikan pendekatan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim, Indonesia juga dapat memperlihatkan dirinya sebagai negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan kerjasama regional. Secara keseluruhan, visi poros maritim dunia dan pilar diplomasi maritimnya sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam memanfaatkan potensi ekonomi dari laut Indonesia dan memperkuat posisi negara di kawasan maritime (Lubis, 2018).

Ide utama poros maritim dapat diketahui dalam 3 makna. *Pertama*, poros maritim dapat dijadikan sebagai sebuah keinginan atau tujuan besar Indonesia yang ingin dicapai. Poros maritim merupakan seruan bagi Indonesia untuk kembali ke jati dirinya sebagai negara maritime yang bersatu, sejahtera dan berwibawa. Hal ini mengacu pada potensi laut Indonesia yang besar dan peran pentingnya sebagai kekuatan maritim di dunia.

Kedua, poros maritim juga bisa diadopsikan menjadi sebuah pemikiran atau panduan yang menunjukkan jalan menuju kepada keinginan bersama. Sebagai pemikiran, pemerintah mengajak agar bangsa Indonesia menjadikan dirinya sebagai ‘Poros Maritim Dunia’. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut global serta memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berdaulat dan mandiri.

Ketiga, gagasan poros maritim Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi, tetapi juga menjadi operasional melalui sejumlah rencana nyata yang ingin diwujudkan pada pemerintahan Jokowi ke depan. Beberapa rencana tersebut antara lain mengenai pengembangan pelabuhan, pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan diplomasi

maritim untuk mengatasi sengketa perbatasan maritim (Rustam, 2016).

Secara keseluruhan, poros maritim dalam visi poros maritim dunia adalah sebuah gagasan kompleks dan memiliki makna yang beragam. Namun, visi tersebut sangat penting bagi Indonesia dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keamanan di sektor maritim serta memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berdaulat dan mandiri di kancah global.

B. Pemecahan Masalah Indonesia dalam Menghadapi Perbatasan Laut

1. Kemunculan Isu Terorisme Maritim

Dalam perspektif ilmu sosial, Indonesia bisa meminimalisir kemunculan berita terorisme maritim memakai teori pertahanan. Pendapat Brigjen (Purn) Makmur Supriyanto disebuah tulisannya “Tentang Ilmu Pertahanan” yang menuliskam bahwa ilmu pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memajemen sumber daya serta kekuatan nasional pada saat damai, perang dan setelah perang untuk menghadapi ancaman militer dan non militer terhadap keberlaksanaan daerah, kedaulatan negara serta keselamatan segenap bangsa dalam rangka menciptakan keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia, kemunculan berita terorisme maritim dapat dihadapi dengan mengelola sumber daya serta kekuatan nasional yang ada, baik secara militer maupun non-militer. Misalnya, pemerintah dapat memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan maritim (Ali et al., 2021).

Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan maritime. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya terorisme maritime serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di daerah-daerah pesisir. Dalam hal ini, teori pertahanan dapat menjadi salah satu landasan dalam menghadapi ancaman terorisme maritim. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang tepat dalam menangani ancaman terorisme maritim adalah dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek, seperti diplomasi, keamanan, ekonomi dan sosial-budaya.

Dalam konteks ini, upaya untuk meminimalisir kemunculan berita terorisme maritim dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pertahanan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertahanan keamanan, pertahanan ketahanan nasional dan pertahanan ekonomi.

Pertahanan keamanan meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman keamanan yang bersifat militer maupun non-militer seperti terorisme maritim. Sementara itu, pertahanan nasional berfokus pada upaya memperkuat kekuatan nasional secara keseluruhan, baik melalui pembangunan sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur maupun pengembangan industri pertahanan.

Pertahanan ekonomi juga penting dalam rangka memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi ancaman terorisme maritim, seperti dengan mengembangkan sektor maritim secara berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Dalam praktiknya, penerapan pendekatan pertahanan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, militer dan masyarakat sipil. Selain itu, upaya meminimalisir kemunculan berita terorisme maritim juga harus didukung oleh kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif untuk mencegah dan menaggulangi ancaman tersebut.

2. Indonesia dalam Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Salah satu cara buat mewujudkan visi poros maritim dunia yaitu menggunakan diplomasi pertahanan maritim. Diplomasi pertahanan maritim menjadi penting dalam konteks visi poros maritim dunia karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan peran penting dalam perdagangan laut global. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan maritim digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kapasitas pertahanan maritim Indonesia, pembentukan kepercayaan dengan negara-negara lain serta pengembangan industri pertahanan maritim. Pembangunan kapasitas pertahanan maritim dapat dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain dalam bentuk latihan militer bersama, peningkatan kemampuan personil dan teknologi serta penguatan infrastruktur pertahanan maritim. Pembentukan kepercayaan dengan negara-negara lain dapat dicapai dengan membangun dialog dan kerjasama dalam bidang keamanan maritim seperti pengawasan keamanan laut, penanggulangan pencurian ikan dan penanggulangan kejahatan lintas negara.

Sementara itu, pengembangan industri pertahanan maritim dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan produksi alat pertahanan maritim sendiri sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri dalam bidang pertahanan maritim. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan maritim dapat dilakukan dengan mengembangkan hubungan bersama negara-negara maju untuk mengembangkam teknologi pertahanan maritim dan melibatkan sektor swasta dalam pengembangan industri pertahanan maritim. Dalam keseluruhan, diplomasi pertahanan maritim

menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi poros maritim dunia dengan membangun kapasitas pertahanan maritim Indonesia, membangun kepercayaan dengan negara-negara lain dan mengembangkan industri pertahanan maritim Indonesia secara mandiri (Samy & Kusumadewi, 2021).

Dalam perspektif ilmu sosial, Indonesia bisa mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia dengan menggunakan teori *sea power*. Alfred Thayer Mahan, seorang Perwira Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dalam sebuah tulisannya yang berjudul “*The Influence of Sea Power upon History*” menuliskan teori bahwa *sea power* artinya unsur terpenting bagi kemajuan dan keberlangsungan suatu negara. Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia dapat mengembangkan kemampuan maritimnya melalui peningkatan kekuatan laut, baik di bidang militer maupun ekonomi. Penguatan kekuatan laut militer dapat dilakukan dengan mengembangkan armada laut, memperkuat pertahanan maritim dan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Sementara itu, penguatan kekuatan laut ekonomi dapat dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi maritim, seperti industry perikanan, perkapalan dan pariwisata (Ali et al., 2021).

Dalam hal ini, teori *sea power* dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat kekuatan laut Indonesia. Dengan memperkuat kekuatan laut, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional serta memperkuat posisinya sebagai poros maritim dunia. Namun, selain memperkuat kekuatan laut, Indonesia juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan poros maritim dunia, seperti diplomasi, perdagangan dan investasi.

Diplomasi maritim Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan visi sebagai PMD (Poros Maritim Dunia) dilaksanakan dengan cara mejalin kerjasama untuk menyelesaikan aneka macam konflik yang bersinggungan dengan kemaritiman negara-negara tetangga, seperti persoalan batas maritim maupun batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Usaha diplomasi maritim yang bersifat kooperatif ini dapat dilihat dari perjuangan Indonesia mendorong terbentuknya berbagai lembaga kerja sama serta konvensi bilateral maupun trilateral dengan negara lain di kawasan. Sebagai contoh, Indonesia tekah mengambil langkah untuk membentuk berbagai lembaga kerja sama regional seperti ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS). Melalui forum-forum ini, Indonesia berupaya mempromosikan dialog dan kerjasama antarnegara dalam mengatasi masalah-masalah keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani berbagai konvensi bilateral dan trilateral dengan negara lain seperti Perjanjian Batas Laut Indonesia-Timor Leste dan Trilateral *Cooperative*

Agreement (TCA) antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Melalui konvensi-konvensi ini, Indonesia berupaya menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan meningkatkan koordinasi dalam mengelola sumber daya laut bersama-sama.

Secara keseluruhan, upaya diplomasi maritim Indonesia yang bersifat kooperatif ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi sebagai PMD. Dengan membangun kerjasama yang kuat dengan negara-negara tetangga, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan maritimnya, meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan serta mempromosikan kesejahteraan bersama di Asia Pasifik.

Namun demikian, tindakan koersif ini sebenarnya merupakan tindakan yang terakhir dilakukan setelah upaya-upaya kooperatif tidak berhasil memecahkan masalah *illegal fishing*. Upaya-upaya persuasif dan kooperatif yang dimaksud adalah seperti melakukan patrol bersama dengan negara-negara tetangga, memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghaga sumber daya laut serta melakukan kerjasama dengan negara-negara penghasil kapal untuk mengendalikan produksi kapal-kapal yang digunakan untuk *illegal fishing*. Dengan demikian, tindakan koersif dalam diplomasi maritim Indonesia bukanlah suatu hal yang dilakukan secara asal-asalan, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum dan kebijakan yang terakhir dilakukan setelah upaya-upaya persuasif dan kooperatif tidak berhasil memecahkan masalah *illegal fishing* (Rijal, 2019).

Dari kedua masalah yang diuraikan di atas, maka keduanya bisa kita selesaikan menggunakan konsep keamanan maritim. Konsep keamanan maritim dapat digunakan sebagai landasan dalam membangun kerjasama dan kemitraan antara negara-negara dalam memperkuat kapasitas keamanan maritim di kawasan. Melalui kerjasama dan kemitraan, negara-negara dapat meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan masing-masing serta memperkuat pertahanan terhadap ancaman-ancaman transnasional seperti terorisme dan kejahatan lintas batas.

Selain itu, konsep keamanan maritim juga dapat digunakan dalam mengatasi masalah *ilegal fishing* dan pencurian sumber daya alam di wilayah perairan. Dalam hal ini, kerjasama antara negara-negara dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan serta memperkuat hukum dan kebijakan terkait penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Dalam kesimpulannya, konsep keamanan maritim dapat menjadi kerangka dalam membangun kerjasama dan kemitraan antara negara-negara dalam memperkuat kapasitas keamanan maritim di kawasan serta dapat digunakan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan

keamanan perairan seperti *illegal fishing* dan pencurian sumber daya alam (Prasetyo et al., 2021).

KESIMPULAN

Tulisan tentang Indonesia dalam menghadapi perbatasan laut dalam perspektif Ilmu Sosial ini membahas dua masalah, yaitu kemunculan isu terorisme maritim dan Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim dunia. Terorisme maritim biasanya dilakukan dengan tujuan politik atau ideologis. Selain itu, terorisme maritim juga dapat dilakukan oleh kelompok subnasional atau negara. Dalam konteks ini, upaya untuk meminimalisir kemunculan berita terorisme maritim dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pertahanan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pertahanan keamanan, pertahanan ketahanan nasional dan pertahanan ekonomi.

Secara keseluruhan, poros maritim dalam visi poros maritim dunia adalah sebuah gagasan kompleks dan memiliki makna yang beragam. Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, Indonesia dapat mengembangkan kemampuan maritimnya melalui peningkatan kekuatan laut, baik di bidang militer maupun ekonomi. Penguatan kekuatan laut militer dapat dilakukan dengan mengembangkan armada laut, memperkuat pertahanan maritim dan meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Sementara itu, penguatan kekuatan laut ekonomi dapat dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi maritim, seperti industry perikanan, perkapalan dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–17.
- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Lubis, R. R. (2018). Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di Admm Plus On Maritime Security. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 27–44.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di indonesia: Lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204–216.
- Prasetyo, K. A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Maritim. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- Rijal, N. K. (2019). Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Global & Strategis*, 13(1), 63–78.
- Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), 1–21.
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45–62.